



Perumusan Kebijakan Pemerintah & Integrasinya dalam Pendidikan Agama Islam

Laila Safitri Siregar¹, Nur Azizah Matondang², Abdusima Nasution³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
Padangsidempuan

Email : lailasafitrisiregar11@gmail.com

Abstract

This study discusses the formulation of government policies and their integration in Islamic education in Indonesia. Islamic education plays an important role in shaping the character, morality, and spirituality of students, therefore requiring proper and directed policies. This study aims to identify the concept of government policy formulation in Islamic education, understand policy integration, explain the policy formulation process, and analyze the implementation and integration of government policies in Islamic education. This research uses a library research method with a qualitative descriptive approach through collecting data from books, journals, and relevant scientific sources. The results show that the formulation of Islamic education policies is carried out through several stages, namely problem identification, agenda setting, policy formulation, policy adoption, implementation, and evaluation. Policy integration is implemented through curriculum integration, institutional integration, character and value integration, as well as the digitalization of Islamic education. Proper policy implementation can create a balance between religious and general knowledge, between tradition and modernity, and between Islamic values and technological development. However, policy implementation still faces various obstacles such as limited human resources, unequal distribution of educational facilities, and weak coordination among institutions. Therefore, synergy between the government, educational institutions, and society is needed so that Islamic education policies can be implemented effectively and sustainably.

Keywords: Government Policy, Islamic Education, Policy Integration, Policy Implementation, National Education

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perumusan kebijakan pemerintah dan integrasinya dalam pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual peserta didik sehingga memerlukan kebijakan yang tepat dan terarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian perumusan kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam, memahami integrasi kebijakan, menjelaskan proses perumusan kebijakan, serta menganalisis implementasi dan integrasi kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data dari buku, jurnal, dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan kebijakan pendidikan Islam dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, penetapan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Integrasi kebijakan dilakukan melalui integrasi kurikulum, kelembagaan, nilai dan karakter, serta digitalisasi pendidikan Islam. Implementasi kebijakan yang baik mampu menciptakan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum, antara tradisi dan modernitas, serta antara nilai keislaman dan perkembangan teknologi. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemerataan fasilitas pendidikan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar kebijakan pendidikan Islam dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Pendidikan Islam, Integrasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Pendidikan Nasional

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembinaan akhlak serta penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan Islam tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mengatur berbagai aspek, seperti sistem pendidikan, kurikulum, standar kompetensi guru, serta pengelolaan lembaga pendidikan. Kebijakan pemerintah tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan agar berjalan secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut Anwar Us dan Kompri, kebijakan pendidikan Islam merupakan upaya strategis pemerintah dalam mengembangkan sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik.

Namun, dalam kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam. Di antaranya adalah kurang efektifnya implementasi kebijakan di lapangan, ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dengan kondisi nyata di sekolah atau madrasah, serta adanya perbedaan kualitas pendidikan antar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dibuat belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu kendala utama dalam pendidikan Islam adalah lemahnya implementasi kebijakan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar pihak.

Selain itu, perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan Islam. Pendidikan Islam dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya integrasi kebijakan, yaitu proses menyelaraskan antara kebijakan pemerintah dengan pelaksanaan di lapangan serta menggabungkan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern.

Integrasi kebijakan menjadi sangat penting karena tanpa adanya integrasi, kebijakan hanya akan menjadi aturan tertulis yang tidak memberikan dampak nyata dalam dunia pendidikan. Integrasi dalam pendidikan Islam diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dibuat tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber data berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan referensi lain yang berkaitan dengan perumusan kebijakan pemerintah dan integrasinya dalam pendidikan Islam.

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai konsep, proses, implementasi, dan integrasi kebijakan pendidikan Islam secara sistematis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyimpulkan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perumusan Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan Islam

Kebijakan pemerintah merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu dalam masyarakat. Dalam bidang pendidikan, kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sistem pendidikan agar berjalan sesuai tujuan nasional.

Menurut William N. Dunn, kebijakan pemerintah adalah suatu rangkaian pilihan yang saling berkaitan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam menangani suatu masalah tertentu.¹ Kebijakan pemerintah dapat diartikan sebagai hasil dari proses intelektual dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam masyarakat. Kebijakan ini meliputi penetapan tujuan yang ingin dicapai, pemilihan alternatif yang sesuai dengan kondisi

¹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013). Hal. 41-43.

yang ada, perkiraan dampak kebijakan di masa depan, serta pelaksanaan evaluasi untuk menilai keberhasilan kebijakan tersebut.²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perumusan kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai penyusunan aturan, tetapi juga sebagai dasar dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan. Kebijakan yang baik harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan pendidikan modern, sehingga tidak hanya meningkatkan aspek akademik, tetapi juga membentuk karakter dan spiritual peserta didik.

Perumusan kebijakan merupakan tahap awal dalam proses kebijakan publik yang meliputi kegiatan merancang, menyusun, dan menentukan alternatif solusi terhadap suatu masalah. Tahap ini sangat penting karena menentukan arah kebijakan yang akan diambil.

Dalam pendidikan Islam, perumusan kebijakan pemerintah berarti proses penyusunan aturan yang berkaitan dengan pendidikan Islam, seperti kurikulum pendidikan agama, standar kompetensi guru dan sistem pengelolaan madrasah. Pendidikan Islam sendiri tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai spiritual peserta didik.

Dengan demikian, perumusan kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam adalah proses sistematis dalam menyusun aturan pendidikan berbasis nilai Islam untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2. Pengertian Integrasi Kebijakan dalam Pendidikan Islam

Integrasi kebijakan adalah proses menyelaraskan berbagai kebijakan agar dapat berjalan secara efektif, terpadu, dan tidak saling bertentangan. Integrasi juga berarti menghubungkan antara konsep dengan praktik di lapangan, sehingga kebijakan yang telah dirumuskan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan pendidikan.³

Dalam pendidikan Islam, integrasi kebijakan dapat dimaknai sebagai upaya menggabungkan berbagai aspek pendidikan agar berjalan secara seimbang dan harmonis, seperti penggabungan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan umum, penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dengan kondisi daerah, serta penyelarasan antara teori yang

² Sumarto, 'Perkembangan Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia', *Thaqafiyat*, 18.1 (2017), Hal. 111.

³ Febri Giantara and Reni Amiliya, 'Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam Sebagai Bagian Dari Kebijakan Publik', *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11.11 (2021), Hal 90–91.

diajarkan dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Dengan adanya integrasi tersebut, proses pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup pembentukan sikap dan perilaku peserta didik.

Integrasi sangat penting karena tanpa adanya integrasi, kebijakan yang dibuat berpotensi hanya menjadi aturan tertulis tanpa memberikan dampak nyata dalam pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu, integrasi berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Integrasi diperlukan agar kebijakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan tidak bersifat parsial. Selain itu, pendidikan Islam memiliki karakter khas yaitu keseimbangan antara pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan akhlak, sehingga integrasi menjadi unsur yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam secara optimal.

3. Proses Perumusan Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan Islam

Proses perumusan kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam merupakan tahapan yang sistematis dan saling berkaitan dalam rangka menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan serta nilai-nilai Islam. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah pendidikan secara umum, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mampu mendukung pembentukan karakter dan spiritual peserta didik. Adapun tahapan tersebut meliputi:⁵

a. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini, pemerintah mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam pendidikan Islam, seperti rendahnya kualitas pembelajaran agama, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten di bidang keislaman, serta ketimpangan fasilitas antara sekolah umum dan madrasah. Identifikasi ini penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pendidikan Islam.

b. Penyusunan Agenda

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi kemudian diseleksi dan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Pemerintah menentukan prioritas permasalahan yang paling mendesak untuk ditangani, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan Islam.

⁴ Jainab Rayanti Ahmad Ridwan, Madyan, Izhar Bafadhal, 'Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam', *Al 'Ulum Jurnal Pendidikan Islam*, 5.2 (2025), Hal. 188.

⁵ Wiwin Widyawati Umar Sidiq, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia*, 1st edn (Ponorogo: Nata Karya, 2019). Hal. 41-45.

c. Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini, pemerintah merumuskan berbagai alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pendidikan Islam, seperti pengembangan kurikulum berbasis nilai-nilai Islam, peningkatan kompetensi guru agama, serta perbaikan sistem pengelolaan lembaga pendidikan Islam.

d. Adopsi atau Penetapan Kebijakan

Setelah berbagai alternatif dirumuskan, pemerintah menetapkan kebijakan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan. Kebijakan ini kemudian disahkan secara resmi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan Islam.

e. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dilaksanakan di lembaga pendidikan Islam, seperti sekolah dan madrasah. Implementasi ini mencakup penerapan kurikulum, metode pembelajaran, serta kegiatan keagamaan yang mendukung tujuan pendidikan Islam.

f. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil meningkatkan kualitas pendidikan Islam serta membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Proses perumusan kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam merupakan upaya yang terencana dan berkelanjutan untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai keislaman.

4. Implementasi dan Integrasi Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan Islam

Kebijakan Pemerintah yang telah dirumuskan oleh pemerintah tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi juga diimplementasikan dan diintegrasikan dalam praktik nyata di lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren. Implementasi kebijakan tidak sekadar menjalankan aturan, melainkan melibatkan proses penyesuaian dengan kondisi lapangan agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan relevan.⁶

a. Integrasi Kurikulum (Menghapus Sekat antara Ilmu Agama dan Ilmu Umum)

Salah satu bentuk implementasi kebijakan yang paling nyata adalah integrasi kurikulum antara ilmu agama dan ilmu umum. Melalui kebijakan Kurikulum

⁶M. Efendi. 'Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia'. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6. 1, (2020), Hal. 77.

Merdeka pada madrasah, pemerintah berupaya menghilangkan dikotomi antara kedua jenis ilmu tersebut.⁷

Peserta didik tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Qur'an, hadist, dan fikih, tetapi juga mempelajari ilmu umum seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, dan teknologi. Sebaliknya, nilai-nilai keislaman juga diintegrasikan ke dalam pembelajaran umum. Misalnya, dalam pembelajaran biologi tentang penciptaan manusia, guru dapat mengaitkannya dengan konsep tauhid.

b. Integrasi Kelembagaan (Penguatan Peran Pesantren melalui Regulasi)

Implementasi kebijakan juga terlihat dalam bentuk integrasi kelembagaan, yaitu pengakuan negara terhadap keberadaan pesantren melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam mengintegrasikan sistem pendidikan pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional.

Melalui regulasi tersebut, pesantren tidak hanya diakui sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga memiliki fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pesantren yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh dukungan dari pemerintah, seperti bantuan operasional dan pengakuan terhadap lulusan melalui program pendidikan kesetaraan.⁸

Banyak pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan formal dengan sistem tradisional. Seperti pada siang hari, santri mengikuti pembelajaran kurikulum nasional, sedangkan pada malam hari mereka tetap mempelajari kitab kuning. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam pendidikan Islam.

c. Integrasi Nilai dan Karakter (Penguatan Moderasi Beragama)

Selain aspek kurikulum dan kelembagaan, integrasi kebijakan juga mencakup penguatan nilai dan karakter peserta didik. Pemerintah mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam sistem pendidikan Islam agar peserta didik memiliki sikap toleran, inklusif, dan cinta tanah air.

Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Projek Profil Pelajar Pancasila. Dalam program ini, peserta didik

⁷ Moh. Rifqi Rahman, 'Model Implementasi Kebijakan Integrasi Lembaga Pendidikan', *Pendidikan Agama Islam*, 11.2 (2023), Hal. 54.

⁸ Febri, 'Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam', *Jurnal Refleksi*, 13.3 (2024), Hal. 434.

tidak hanya belajar teori, tetapi juga melakukan kegiatan nyata yang mencerminkan nilai-nilai keislaman dan sosial.

d. Integrasi Digital (Transformasi Pendidikan Islam di Era Teknologi)

Di era perkembangan teknologi, implementasi kebijakan juga diarahkan pada digitalisasi pendidikan Islam. Pemerintah mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran agar pendidikan Islam dapat mengikuti perkembangan zaman.

Hal ini diwujudkan melalui berbagai program, seperti penggunaan platform e-learning madrasah, digitalisasi bahan ajar, serta pelatihan guru berbasis teknologi. Dengan adanya integrasi digital, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan mudah diakses oleh peserta didik.⁹

Implementasi dan integrasi kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan. Kebijakan tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Keberhasilan integrasi ini terlihat dari adanya keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum, antara tradisi dan modernitas, serta antara nilai keislaman dan tuntutan global. Dengan demikian, pendidikan Islam diharapkan mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan nilai spiritual yang kuat.

Meskipun berbagai kebijakan telah dirumuskan dan diimplementasikan, pada kenyataannya masih terdapat berbagai kendala di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemerataan fasilitas pendidikan, serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, integrasi kebijakan sering kali belum berjalan secara optimal karena adanya perbedaan kondisi antar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan yang baik, tetapi juga oleh kesiapan pelaksana dan dukungan sistem yang memadai serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan tepat sasaran.

KESIMPULAN

⁹ Husnul Amin, 'Integrasi Pendidikan Islam', *Raudhah: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 2.1 (2017), Hal. 109.

Perumusan kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam merupakan proses yang sistematis dan terencana, mulai dari identifikasi masalah hingga penetapan kebijakan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman.

Integrasi kebijakan dalam pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk menyelaraskan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan pelaksanaan di lapangan. Integrasi ini mencakup berbagai aspek, seperti kurikulum, kelembagaan, nilai dan karakter, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dengan adanya integrasi, kebijakan tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi dapat memberikan dampak nyata dalam proses pendidikan.

Selain itu, implementasi kebijakan merupakan tahap penentu keberhasilan suatu kebijakan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, keberhasilannya sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan, dukungan sumber daya, serta kerja sama antara berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar kebijakan pendidikan Islam dapat berjalan secara efektif.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam tidak hanya memerlukan perumusan yang sistematis, tetapi juga implementasi yang konsisten serta integrasi yang menyeluruh agar mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ridwan, Madyan, Izhar Bafadhal, Jainab Rayanti, 'Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam', *Al 'Ulum Jurnal Pendidikan Islam*, 5.2 (2025), 188
- Amin, Husnul, 'Integrasi Pendidikan Islam', *Raudhah: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 2.1 (2017), 109
- Anwar Us, K., & Kompri. *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia (Dahulu, Kini dan Masa Depan)*. (Semarang: PUSAKA, 2017)
- Febri, 'Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam', *Jurnal Refleksi*, 13.3 (2024), 434
- Giantara, Febri, and Reni Amiliya, 'Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam Sebagai Bagian Dari Kebijakan Publik', *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11.11 (2021), 90–91

- M. Efendi. 'Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia'. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6. 1, (2020),. 77.
- Musdalipah. "Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah Pendidikan Islam". *Jurnal Refleksi*, 13. 3, (2024), Hal. 45.
- Moh. Rifqi Rahman, 'Model Implementasi Kebijakan Integrasi Lembaga Pendidikan', *Pendidikan Agama Islam*, 11.2 (2023), 54
- Sumarto, 'Perkembangan Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia', *Thaqafiyat*, 18.1 (2017), 111
- Umar Sidiq, Wiwin Widyawati, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia*, 1st edn (Ponorogo: Nata Karya, 2019)
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013)